

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde Baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto dan merupakan sebutan bagi rezim yang berkuasa saat itu. Pada masa awal Orde Baru, diwarnai dengan ketidak stabilan kondisi politik maupun ekonomi pasca lengsernya soekarno dari kursi kepresidenan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Orde Baru pun berbeda dengan pemerintahan sebelumnya termasuk politik luar negeri Indonesia. Menurut Arifin, et al (2018: 101) menyebutkan bahwa :

“Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional dalam negara tersebut dalam lingkup internasional. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya”.

Dari kutipan tersebut dapat diambil pengertian bahwa, Politik Luar Negeri adalah strategi atau rencana pemerintah, dalam mengambil keputusan termasuk hubungan-hubungannya dengan Negara lain, berdasarkan kepentingan Nasional dalam kancah Internasional. Lebih jauh (Sabir, 1987) menuturkan dalam bukunya yang berjudul Politik Bebas Aktif, menyebutkan bahwa istilah antara Politik Luar Negeri maupun Kebijakan Luar Negeri sebenarnya tidak ada perbedaaan, keduanya mempunyai arti yang sama, apa yang disebut Politik Luar Negeri adalah Kebijakan Luar Negeri.

Terkait dengan politik bebas aktif, yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain, sudah dicetuskan oleh wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, Drs. Mohammad Hatta dihadapan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 2 September 1948. Dikutip dari Noventari (2014: 124-125). Moh. Hatta menyebutkan bahwa :

“Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah bahwa Indonesia yang harus menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri. Politik Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri”

Politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan prinsip bebas dan aktif, dengan berlandaskan kepentingan nasional. Walaupun dalam keterangannya tersebut Moh. Hatta tidak menyebutkan secara spesifik istilah politik bebas aktif, namun keterangannya dihadapan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) tersebut berjudul “mendayung diantara dua karang” yang memiliki makna politik bebas aktif. Seperti yang dijelaskan didalam buku (Sabir, 1987) mendayung artinya upaya atau kegiatan (aktif), dan diantara dua karang adalah tidak terikat oleh dua kekuatan dunia (bebas).

Prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan politik luar negeri, telah dinyatakan secara gamblang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni pada alinea pertama dan alinea ke-empat, alinea pertama menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Pada alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia harus turut aktif untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dua prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, nyatanya menjadi motor penggerak Indonesia dalam panggung politik Internasional, yang tercetus dalam politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas memiliki arti bahwa, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan sikap dalam merespon masalah-masalah yang ada, tanpa memihak pada salah satu blok kekuatan dunia. Dan aktif memiliki arti bahwa, Indonesia selalu mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Abidin, 2019).

Selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk pengambilan kebijakan Luar Negeri, Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan Idiil negara, yang otomatis kelima sila pancasila digunakan sebagai pedoman politik luar negeri Indonesia. Terutama sila kedua, yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia, atau pengisapan oleh bangsa lain. Atas dasar sila kedua Pancasila tersebut, Indonesia secara aktif menentang segala bentuk penjajahan.

Tepat satu tahun lebih satu hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada Tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto secara resmi

dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini pun menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno, dan mulailah era Orde Baru. Pada tahun 1966 merupakan masa transisi dari era Soekarno, ke era Soeharto. Dengan ditandai terjadinya perubahan perhatian pemerintah dari masalah pembangunan bangsa ke masalah perbaikan ekonomi.

Jejak langkah politik luar negeri era Soeharto dijalankan dengan kooperatif, yang berlandaskan prinsip politik bebas dan aktif. Awal pemerintahan, Orde Baru dihadapkan dengan problem regional yakni konfrontasi Malaysia. Dimulai sejak tanggal 17 September 1963, dimana Malaysia mendeklarasikan diri sebagai negara federasi. Soekarno yang masih menjabat Presiden saat itu, beranggapan bahwa pembentukan negara federasi Malaysia adalah Neokolonialisme jenis baru yang dapat mengancam keselamatan bangsa yang masih seumur jagung. Tak hanya itu, era Orde Baru juga ikut merasakan kebijakan keluar dari keanggotaan PBB sebagai buntut konflik Indonesia dan Malaysia (Notosusanto, 1992).

Masa Orde Baru bisa dikatakan masa awal melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Pada masa pemerintahan Orde Baru arah kebijakan politik luar negeri Indonesia berubah dan lebih menekankan kondisi ekonomi dan stabilitas politik. Politik bebas aktif diimplementasikan dengan mendekatnya Indonesia dengan negara Barat, bukti nyata mendekatnya Indonesia dengan Barat adalah dengan masuknya kembali Indonesia ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bermarkas di Amerika Serikat. Pemerintahan Orde Baru ini juga menunjukkan penyimpangan dari arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada era ini terlihat bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk mendekati negara-negara Barat dan menjauhi negara-negara komunis (Suryadinata, 2019). Pemutusan hubungan diplomatik merupakan sebuah tanda untuk merubah citra sebagai negara anti komunis. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina juga digunakan untuk menarik perhatian negara barat, dengan harapan negara barat mau membantu dan memberikan bantuan berupa pinjaman luar negeri guna merehabilitasi prekonomian Indonesia.

Keadaan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru mengalami guncangan dahsyat, ditandai dengan hiper Inflasi yang mencapai 650 persen. Terlebih pada masa pemerintahan Soekarno Indonesia menerapkan sikap anti barat (Notosusanto, 1992). Kondisi sulit tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi dan rehabilitasi dibidang

ekonomi. Dengan melihat kondisi prekonomian, tindakan perbaikan ekonomi dipandang Orde Baru mustahil untuk dilakukan jika hanya mengandalkan kekuatan dari dalam negeri. Oleh karena itu, upaya menutup diri dari bantuan asing mulai ditinggalkan, diganti dengan sikap membuka diri, berorientasi keluar, menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara barat, yang bertujuan untuk melancarkan pembangunan itu sendiri. Kebijakan yang digunakan pun kebijakan pintu terbuka, dengan meningkatkan investasi asing dan mencari bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia (Suryadinata, 2019).

Pengendalian ekonomi harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan Soeharto kala itu, untuk dapat mengendalikan prekonomian membutuhkan biaya serta kerjasama dari semua lapisan termasuk kerjasama luar negeri. Dari kondisi yang sudah dijelaskan diatas maka dalam misi mewujudkan Stabilitas Nasional dibidang politik maupun ekonomi. Pemerintahan Orde Baru menyiapkan Undang-undang yang menjadi landasan operasional. Dalam sidang MPRS tahun 1966 dikeluarkannya dua ketetapan antara lain (Sabir, 1987) :

1. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Dengan ditetapkannya landasan baru, maka politik luar negeri era Orde Baru harus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Sejak Soeharto memimpin, terjadi perubahan siklus politik luar negeri Indonesia, yang menganggap negara barat lah yang dapat membantu Indonesia untuk keluar dari kondisi sulit yang sedang dialami. Terjadinya perubahan terhadap hubungan ekonomi Internasional. Indonesia tak memandang asing sebagai musuh dan lebih mengarahkan untuk bekerjasama, menjalin hubungan bilateral maupun multilateral untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari kebangkrutan di akhir tahun 1965. Upaya membangun stabilitas nasional merupakan respon logis yang harus dilakukan pemerintah, untuk mengakhiri tahun-tahun kelam pasca lengsernya Soekarno. Pada intinya Orde Baru menggemborkan pada khalayak ramai bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan ekonomi, atau ekonomi menjadi fokus utama pada era awal kepemimpinannya.

Penelitian ini, di fokuskan dalam meneliti Kebijakan luar negeri Indonesia masa awal Orde Baru dalam menciptakan stabilitas nasional dengan kurun waktu 1967 sampai 1971. Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih dalam sebab

kebijakan luar negeri untuk sektor politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Soeharto berbanding terbalik dari kebijakan luar negeri masa Demokrasi terpimpin. Melalui penelitian ini juga kiranya dapat memberikan pemahaman dan kontribusi pemikiran yang jelas dan konkrit bagi kita semua, termasuk kalangan akademis, terkait kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah usaha mewujudkan Stabilitas Nasional dibidang politik dan ekonomi pada masa awal Orde Baru diperlukan adanya kebijakan Luar Negeri. Dari masalah tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971)?
2. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dibidang ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971)?
3. Bagaimana upaya mewujudkan stabilitas nasional dibidang politik pada masa awal Orde Baru (1967-1971)?
4. Bagaimana upaya mewujudkan stabilitas nasional dibidang ekonomi pada masa awal Orde Baru (1967-1971)?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam usaha mewujudkan stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971)?

Dari rumusan masalah yang disampaikan, maka dapat diangkat judul penelitian sebagai berikut:

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DIBIDANG POLITIK DAN EKONOMI DALAM UPAYA UNTUK MEMBANGUN STABILITAS NASIONAL PADA MASA AWAL ORDE BARU (1967-1971).

C. Batasan Konsep Dan Istilah

1. Batasan Konsep

Dalam penelitian historis, batasan konsep dalam sejarah dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

a) Konsep tentang kebijakan Luar Negeri

Kondisi sengkarut pasca Orde Lama, membuat pemerintahan Soeharto harus secara cepat dan efektif mengambil sebuah kebijakan. Sebelum menggali lebih dalam mengenai kebijakan apa saja yang diambil pemerintahan Orde Baru, penulis berangapan harus dipahami terlebih dahulu, apa makna kebijakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna kebijakan.

Miriam Budiarto dalam bukunya mengemukakan kebijakan luar negeri sebagai berikut :

“Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya” (Budiarto, 2008: 20).

Dari uraian tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kuasa penuh atas pengambilan keputusan, dan kebijakan luar negeri terdapat tujuan didalamnya.

“Kebijaksanaan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan kepada tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut” (Pratiwi, 2015: 4).

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah manifestasi dari politik luar negeri, didalamnya terdapat tujuan nasional yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu subjek utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Sedangkan menurut M. Sabir (1987: 10) menyebutkan bahwa:

“Apa yang disebut politik luar negeri adalah kebijaksanaan luar negeri. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan dalam menjalin hubungan dengan Negara-negara lain”.

Dari pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa, politik luar negeri merupakan sebuah ide, cara persuasif yang dilakukan negara maupun organisasi dalam berhubungan dengan negara lain.

b) Konsep tentang Politik

Terjadinya penyimpangan mengenai prinsip politik bebas dan aktif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama, menghasilkan boomerang efek bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu pelurusan terkait politik bebas dan aktif mulai dipupuk pada era pemerintahan Soeharto. Terkait dengan politik, dapat dimaknai dari beberapa sumber di bawah ini antara lain :

“Politik merupakan cara menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat Undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal merugikan bagi kepentingan manusia” (Nursyamsu, 2017: 167-182).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa politik merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan menciptakan seperangkat aturan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Mariam Budiardjo (2008: 15) mengemukakan bahwa :

“Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis”

Politik merupakan upaya pengambilan keputusan dengan sejumlah peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan keselarasan hidup masyarakat sehingga mencapai kebahagiaan bersama.

Sedangkan menurut (Kurnianto, 2012: 3) menjelaskan bahwa “Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara”

Dari kutipan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa politik, merupakan proses pembagian kekuasaan di tengah masyarakat yang korelasinya adalah pembuatan keputusan didalam sebuah negara.

c) Konsep tentang ekonomi

Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan interaksinya. Dinamika hubungan politik dan ekonomi, telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia. Perubahan politik akan berlaku

Kehidupan ekonomi. Di sisi lain, kehidupan ekonomi akan berdampak pada kehidupan politik.

Menurut (Idris, 2018: 17) menyebutkan bahwa “ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan kegiatan (wants) yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat”. Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa, ekonomi merupakan suatu aktivitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. yang dapat menaikkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat.

“Ekonomi merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya masyarakat yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing” (Damsar dan Indrayani, 2016:11)

Dari kutipan diatas dapat diambil pengertian bahwa, ekonomi merupakan sebuah usaha dalam membuat keputusan dimana dalam pelaksanaannya ditentukan oleh sumberdaya masyarakat yang ada dengan melihat kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut (Dinar dan Hasan, 2019: 5) menyebutkan bahwa “Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari seluruh aktivitas manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”. Dari kutipan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari kegiatan manusia secara menyeluruh mengenai cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pada masa Orde Baru perhatian pemerintah diarahkan kepada ekonomi dan pembangunan, pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Soeharto memperkenalkan kebijakan pintu terbuka, dimana intesasi asing ditingkatkan dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia.

d) Konsep tentang Stabilitas Nasional

Stabilitas nasional merupakan harapan yang harus bisa diciptakan pemerintah Orde Baru. Secara garis besar, problem yang dihadapi pemerintah era Soeharto adalah bagaimana cara mengatasi masalah yang diwariskan oleh pemerintahan era Soekarno. Berikut

merupakan pengertian stabilitas nasional yang diambil dari berbagai sumber, antara lain :

“Stabilitas Nasional adalah situasi yang stabil atau kondusif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, terkait dengan menciptakan kenyamanan dalam mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia”. (Suharto, 2019: 10).

Dari kutipan diatas dapat diambil pengertian bahwa stabilitas nasional digambarkan sebagai keadaan yang kondusif diberbagai bidang yang menjadi tiang utama dalam terciptanya kenyamanan negara Republik Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Sedangkan menurut (Farihi, 2018: 64) menyebutkan bahwa “Stabilitas Nasional merupakan keadaan nyaman dalam sebuah negara dari ancaman-ancaman dan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kehidupan bernegara”.

Muridan S. Widjojo Dalam (Bisri dan Hidayat, 2017: 62) menjelaskan bahwa: “Stabilitas nasional adalah syarat mutlak untuk keberhasilan suatu pembangunan, sedangkan tujuan dan isi pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka stabilitas nasional haruslah stabilitas yang dinamis, stabilitas yang memberi ruang gerak pada perubahan, perbaikan dan kemajuan bukan stabilitas yang terkesan mandeg dan beku”.

Dari pengertian diatas dapat digambarkan bahwa Stabilitas Nasional merupakan syarat utama dalam keberhasilan pembangunan dalam sebuah negara, dengan kesejahteraan dan keadilan rakyat sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri, terlebih menurut Muridan S. Widjojo stabilitas nasional haruslah memberikan kontribusi bagi negara bukan stabilitas yang bersifat stagnansi.

Dari ketiga teori diatas dapat ditarik pengertian bahwa makna Stabilitas Nasional merupakan keadaan nyaman, aman dan kondusif dari ancaman-ancaman dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi syarat mutlak sebuah negara yang ingin menuai keberhasilan dalam proses pembangunan.

Pergantian rezim sudah barang tentu di ikuti dengan perubahan kebijakan. Masa Orde Baru merupakan masa yang identik dengan kepemimpinan Soeharto. Tidak seperti Soekarno, Soeharto lebih menaruh perhatian pada masalah pembangunan ekonomi dan

mempertahankan hubungan persahabatan dengan pihak barat. Bukan tanpa alasan semua itu dilakukan demi terciptanya stabilitas Nasional.

e) Konsep tentang Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, pemerintahan yang paling lama berkuasa dalam sejarah Indonesia. Orde Baru berkuasa kurang lebih selama 32 tahun.

Menurut (Permana, 2018) menyebutkan bahwa “Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintahan Soeharto yang menggantikan Orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno”.

Sedangkannya menurut (Yuningsih, 2015) menjelaskan bahwa “Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai terjadinya peralihan kekuasaan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Baharuddin Jusuf Habibie pada 21 Mei 1998”.

Sedangkan menurut (Kusumaningrum, 2019) dijelaskan bahwa “Orde Baru merupakan sebuah istilah atau sistem yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kepemimpinan Presiden Soekarno dan periode pemerintahan dibawah pimpinan Soeharto”.

Tonggak awal lahirnya Orde Baru dimulai pada saat dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto menjadi penjabat presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Pengukuhan tersebut merupakan implementasi dari Ketetapan MPRS No. XXXIII / 1967 menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara Presiden Sukarno harus dicabut, dan mandat MPRS ditarik dari Presiden Sukarno.

2. Batasan Istilah

a) Istilah Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan rencana (dalam hal ini pemerintah) yang disusun secara terstruktur untuk merespon permasalahan yang terjadi, kebijakan merupakan keputusan untuk menindak ataupun

mengatur sebuah aktivitas yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bersama dalam kancah Internasional.

b) Istilah Politik

Politik adalah sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan menciptakan seperangkat aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

c) Istilah ekonomi

Ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

d) Istilah tentang stabilitas nasional

Stabilitas nasional diartikan sebagai keadaan yang kondusif atau terciptanya suasana kenyamanan guna tercapainya tujuan nasional Indonesia.

e) Istilah Orde Baru

Orde Baru merupakan salah satu bentuk peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Orde Baru merupakan sebutan pemisah bagi rezim yang berkuasa pada saat itu.

D. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini sesuai dengan permasalahan diatas, kemudian penulis menguraikan agar memahami arah kegiatan yang akan dilakukan. Adapun tujuan kajian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971).
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri Indonesia dibidang ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971).
3. Untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan stabilitas nasional dibidang politik pada masa awal Orde Baru (1967-1971).
4. Untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan stabilitas nasional dibidang ekonomi pada masa awal Orde Baru (1967-1971).

5. Untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam usaha mewujudkan stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971).

E. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teori

Menambah Khasanah intelektual dalam wacana pemikiran tentang perpolitikan luar negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru tahun 1967-1971.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Metro, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami ilmu Pendidikan, khususnya Sejarah mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dan ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971).

b. Bagi Akademisi

Dalam kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan, dan bahan informasi atau literatur-literatur penulis, khususnya pembaca dalam pembelajaran Sejarah. Dan penelitian ini diharapkan bisa mewarnai dinamika keintelektualan dibidang politik baik dikalangan akademisi maupun non-akademisi.

F. Metode Kajian

Pada saat melakukan riset dan penulisan sejarah, peneliti harus mengikuti perosedur metode ilmiah. Maka dari itu penulis dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian sejarah, metode penelitian sejarah sendiri dapat di tafsirkan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri secara efektif dan efisien. Menurut Gilbert J. Garragan dikutip dari Daliman (2012: 75) menjelaskan bahwa :

“Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis”

Dari pernyataan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa metode sejarah adalah sebuah cara yang digunakan dalam penelitian berdasarkan aturan-aturan yang telah terstruktur untuk dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan menguji data secara kritis yang diperoleh dari berbagai sumber agar data tersebut bersifat fakta dan dapat dipercaya kebenarannya.

Secara sistematis penelitian sejarah secara sederhana dapat dijabarkan dengan beberapa tahap. Dikutip dari Kuntowijoyo (2005: 91) menjelaskan bahwa "Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan". Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap penelitian sejarah.

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dianggap penting dalam penelitian sejarah sebab topik yang dipilih haruslah topik sejarah dan dapat diteliti sejarahnya. Hendaknya pilihlah topik yang dapat dikerjakan dan jangan teralu luas sehingga melebihi batas waktu. Dikutip dari Kuntowijoyo (2005: 92) topik sebaiknya berdasarkan :

a. Kedekatan emosional

Kedekatan emosional dapat diartikan bahwa dalam memilih topik peneliti hendaknya memiliki ketertarikan emosional, menganggap bahwa penelitian tersebut berharga keberadaannya dan memiliki ketertarikan dengan topik yang akan dikaji .

b. Kedekatan Intelektual

Dapat diartikan bahwa jika peneliti sudah memiliki kedekatan emosional maka rasa 'Tertarik' akan muncul pada dirinya, sehingga peneliti akan mencari dan membaca sumber data baik dari buku, jurnal, artikel dan lain-lain, sehingga peneliti dapat menguasai materi terkait dengan topik yang dipilih.

c. Rencana penelitian

Rencana penelitian dapat digambarkan setelah peneliti sudah memiliki kedekatan emosional maupun intelektual. Rencana penelitian sendiri dapat diartikan sebagai agenda atau planing dalam penelitian, meliputi pengumpulan dan menganalisis sumber data.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa pemilihan topik memiliki arti penting untuk jalanya penelitian itu sendiri. Pemilihan topik

harus objektif dalam arti 'diri kita tertarik untuk meneliti sebuah topik apa'. Pada dasarnya jika kita memilih topik sesuai dengan ketertarikan yang kita rasakan maka akan mudah dalam pengerjaannya dan mampu diselesaikan.

2. Heuristik (Pengumpulan sumber)

Pengumpulan sumber data atau dalam penelitian sejarah dikenal dengan nama Heuristik merupakan kegiatan menghimpun data dari berbagai sumber terkait dengan topik yang dipilih, yang akan digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri dan akan diuji kebenarannya berdasarkan pengalaman atau penemuan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel maupun tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis terkait dengan topik yang akan diteliti. Data-data tersebut penulis peroleh dari sejumlah perpustakaan antara lain : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro dan Perpustakaan Nasional Indonesia (Online).

Tabel 1: Keterangan Data Buku Sumber

NO	Jenis Sumber	Keterangan
1	Menyibak tabir Orde Baru	Asli
2	Politik Bebas Aktif	Asli
3	Orde Baru	Asli
4	Perekonomian Indonesia	Asli
5	Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto.	Asli
6	Sejarah Nasional Indonesia VI	Asli

3. Verifikasi (Kritik dan keabsahan sumber)

Sebagai hasil penelitian sejarah yang akademis dan kritis memerlukan fakta-fakta yang teruji kebenarannya. Maka dari itu data yang diperoleh melalui tahap heuristik harus dikritik atau ditelaah sehingga diperoleh data yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kritik tersebut merupakan autentisitas atau kritik ekstern dan kredibilitas atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2005).

a. Kritik Ekstern

Adapun langkah-langkah kritik ekstern menurut Daliman (2012: 71) antara lain :

- 1) Menguji didalam sumber apakah Nama pengarang dan tanggal yang tercantum adalah benar dan asli.

2) Menguji keaslian sumber atau dokumen agar terhindar dari sumber hasil dari plagiatisme.

3) Mengecek antara buku dan judul penelitian tersebut relevan.

Untuk mengetahui validitas sumber-sumber data dikemukakan data table kritik ekstern sebagai berikut:

Tabel 2. Uji kesejatian sumber data “kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dan ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971)”

No	Tema yang dibahas	Sumber data/pengarang	Keterangan
1	Pemulihan Ekonomi	Jusuf Wahandi	Asli (122-125)
2	Politik bebas aktif	M. Sabir	Asli (37-85)
3	Keadaan ekonomi masa Orde Baru	Hendra Permana	Asli (29-38)
4	Rencana Pembangunan Ekonomi Masa Orde Baru	Ismail Hasang dan Muhammad Nur	Asli (82-89)
5	Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya	Leo Suryadinata	Asli (198-227)
6	Era Orde Baru	Nugroho Notosusanto	Asli (387-510)

b. Kritik Intern

adapun langkah-langkah dalam kritik intern menurut Daliman (2012: 73) antara lain :

- a. Membaca dan mempelajari suatu sumber data untuk menyesuaikan isi dari sumber data dengan peristiwa yang tertuang didalam buku.
- b. Mengecek kebenaran dan keseuaian antara tanggal dari buku dengan peristiwa yang tertuang didalam buku.
- c. Kolaborasi, kontradiksi dan pengukuran.

Tabel 3. Uji kesejatian sumber data “kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dan ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru (1967-1971)”

No.	Buku Sumber	Konsep yang dibahas	Hal buku sumber	Ket sumber
1	Menyibak tabir Orde Baru	Pemulihan ekonomi	122-125	Asli
2	Politik Bebas Aktif Orde Baru	Politik bebas aktif	37-85	Asli
3	Orde Baru	Keadaan ekonomi masa Orde Baru	29-38	Asli
4	Perekonomian Indonesia	Rencana Pembangunan Ekonomi Masa Orde Baru	82-89	Asli

No.	Buku Sumber	Konsep yang dibahas	Hal buku sumber	Ket
5	Politik luar negeri Indonesia di bawah soeharto.	Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya	198-227	Asli
6	Sejarah Nasional Indonesia VI	Era Orde Baru	387-510	Asli

4. Interpretasi (Penafsiran)

Setelah mendapatkan data pada tahap heuristik dan selesai melakukan verifikasi atau kritik sumber, langkah selanjutnya adalah Interpretasi. Menurut (Kuntowijoyo, 2005) Interpretasi adalah proses penafsiran fakta sejarah. Terdapat dua point penting dalam interpretasi atau penafsiran sejarah, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Dari pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa, interpretasi merupakan aktivitas menguraikan fakta-fakta sejarah dan disatukan kembali, sehingga mempunyai makna yang berkesinambungan dengan yang lainnya.

Langkah-langkah dari interpretasi data, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

- a. Menguraikan data-data dari sumber yang berbeda.
- b. Merekonstruksi dan menyatukan fakta-fakta yang diperoleh dari beberapa sumber sejarah.
- c. Menafsirkan fakta-fakta kedalam kalimat bermakna, yang berkesimbangan antara satu dengan lainnya.

5. Historiografi (Penulisan Kembali)

Historiografi atau penulisan kembali merupakan tahap terakhir pada metode penelitian sejarah, setelah pengumpulan sumber, kemudian diverifikasi atau kritik sumber menjadi data-data, kemudian data-data yang telah dihimpun ditafsirkan atau dimaknai sebagai fakta. Langkah terakhir adalah peneliti menyusun seluruh data yang telah melewati tahap diatas menjadi sebuah tulisan utuh dengan jenis tulisan Naratif-Deskriptif dimana penulis mengungkapkan atau menceritakan sebuah peristiwa secara kronologis atau berurutan berdasarkan waktu kejadian. Dan kemudian dijelaskan kembali seolah-olah penulis menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut dengan tujuan pembaca dapat merasakan, melihat apa yang penulis ingin sampaikan. Bentuk akhir berupa skripsi yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dibidang Politik Dan Ekonomi Dalam Upaya Untuk Membangun Stabilitas Nasional Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1971)".

G. Kajian Relevan

Dalam Penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu, baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak, artikel jurnal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam sebuah hasil penulisan sejarah. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

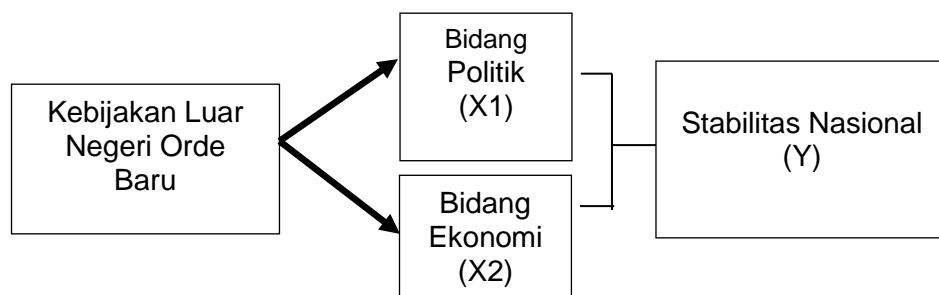
1. Skripsi Bastian Danang Setiawan 2014 Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah Tujuan politik luar negeri Indonesia telah terumuskan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alenia keempat. Adam Malik berhasil menyelesaikan hubungan normalisasi Indonesia-Malaysia. Adam Malik membentuk ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adam Malik juga berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. Politik luar negeri Indonesia terhadap Negara-negara anggota ASEAN didasarkan pada rasa saling percaya dan menghormati yang mengadakan kerjasama bilateral. Keterkaitan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diangkat penulis adalah sama-sama meneliti politik luar negeri era Orde Baru. Namun kajian tersebut lebih mengindikasikan peran Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dalam pembentukan ASEAN.
2. Skripsi Fiky Arista 2017. Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja Dan Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan misi dari para menteri luar negeri era Orde Baru dalam mengambil kebijakan luar negeri. Adam Malik lebih terfokus dalam menyelesaikan problematik yang diwariskan masa pemerintahan Soekarno, Mochtar Kusumaatmadja mengedepankan hukum Internasional dan Wawasan Nusantara, sedangkan Ali Alatas terfokus pada masalah Hak Asasi Manusia dan menjadikan Indonesia ketua Gerakan Non Blok. Keterkaitan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengemukakan peran Adam Malik, namun tidak untuk mencari perbedaan misi yang pernah diemban oleh para Menteri luar negeri era Orde Baru.

3. Skripsi Agus Haryanto, 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. prinsip bebas aktif akan dilihat dalam perspektif teori peran dalam kebijakan luar negeri. Dalam teori peran, kebijakan luar negeri sebuah negara bersumber pada dua hal yaitu konsepsi peran dan harapan peran. Prinsip bebas aktif merupakan salah satu sumber konsepsi peran bagi Indonesia sehingga prinsip ini patut dilihat seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana digunakan oleh para pengambil kebijakan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi dinamika politik luar negeri dengan prinsip bebas aktif dari masa Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kajian yang dilakukan peneliti di atas relevan dengan kajian yang diangkat penulis yakni mengemukakan prinsip politik bebas dan aktif yang selalu dipegang teguh oleh para pemimpin Republik Indonesia. namun terdapat perbedaan, antara lain peneliti lebih terfokus meneliti kebijakan luar negeri yang lebih dominan pada era Orde Baru atau sebelum reformasi.

Walaupun ada keterkaitan, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun fokus dari kajian ini adalah Kebijakan luar negeri Indonesia dibidang politik dan ekonomi dalam upaya untuk membangun stabilitas nasional pada masa awal Orde Baru dalam kurun waktu mulai dari 1967 sampai 1971.

H. Kerangka Pemikiran

Pada penulisan sejarah ini peneliti menggunakan kerangka pikir yang tujuannya adalah sebagai dasar landasan paradigma penelitian harapannya agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat, efektif dan efisien. Dalam praktiknya kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik maupun ekonomi dalam panggung Internasional selalu berbanding lurus dengan tujuan Nasional.



Gambar 1: Kerangka Pikir

Keterangan:

- X : Kebijakan Luar Negeri Orde Baru
 X1 : Bidang Politik
 X2 : Bidang Ekonomi
 Y : Stabilitas Nasional

Dari kerangka pikir di atas dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional diperlukan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru berbeda signifikan dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Kebijakan luar negeri pada era Orba lebih menitik beratkan pada masalah prekonomian, awal pemerintahan Orba, Indonesia sedang dilanda masalah ekonomi yakni hiperinflasi yang mencapai 650 persen pada akhir tahun 1965, belum lagi problematik untuk sektor politik khususnya politik luar negeri yang mengalami situasi 'terisolasi' dari pergaulan dunia dan citra Indonesia kala itu dicap sebagai negara radikal dan militansi.

Menciptakan Stabilitas nasional untuk sektor politik maupun ekonomi merupakan reaksi Orde Baru atas problematika yang sedang dihadapi Indonesia, sebab negara yang kuat harus memiliki ekonomi yang hebat. Manuver-manuver kebijakan segera diambil pemerintah dengan diiringi tujuan nasional yakni menciptakan stabilitas nasional.

I. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian Historis
2. Objek Penelitian Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dibidang Politik Dan Ekonomi Dalam Upaya Untuk Membangun Stabilitas Nasional Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1971).
3. Subjek Penelitian Buku-buku, literatur, dan sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.
4. Tempat Penelitian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.
5. Waktu Penelitian Tahun 2020-2021